



RINGKASAN EKSEKUTIF

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA**

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

1. Pendahuluan

Kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Sehingga diperlukan sistem informasi lingkungan hidup untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi sumber informasi dalam menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan informasi faktual tentang kondisi lingkungan hidup dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jakarta. Dokumen lingkungan ini dapat menjadi acuan pendekatan terdekat bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan dan pembangunan keberlanjutan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

2. Analisis Lingkungan Hidup Daerah

Metode penyusunan dokumen DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melakukan pengumpulan data time series yang diolah secara statistik dan disampaikan secara analisis dengan model DPSIR. Model DPSIR adalah kerangka berpikir yang mengasumsikan hubungan kausalitas antar aspek lingkungan dan manusia sebagai pendorong (*Driving Force*) terhadap terjadinya tekanan (*Pressure*) sehingga mempengaruhi perubahan ekosistem (*State*) yang berdampak (*Impact*) pada manusia dan/atau lingkungan untuk selanjutnya ditanggapi (*Response*) melalui berbagai strategi untuk penanganan risiko.

2.1 Tata Guna Lahan

2.1.1 *Driving Forces*

Untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pemerintahan yang berlangsung di DKI Jakarta, maka lahan yang terbatas perlu ditata agar fungsinya berjalan optimal. Pada tahun 2021, geliat pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta terasa kembali menyala dengan sektor konstruksi mencatatkan peningkatan nilai proyek konstruksi sebesar 1,53% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan sektor konstruksi ini menandakan semakin luas areal lahan terbangun, termasuk lahan terbangun yang digunakan untuk pembangunan pemukiman. Pertambahan pembangunan rumah oleh Perum Perumnas mencapai 1.090 unit dan rumah susun sederhana sebanyak 42 unit pada tahun 2021.

2.1.2 *Pressure*

Peruntukan lahan di Provinsi DKI Jakarta didominasi permukiman mencapai 50% dari luas daratan utama DKI Jakarta, sedangkan untuk industri, perkantoran, dan perdagangan dapat mencapai 19%. Sementara ruang terbuka hijau (RTH) mengisi porsi sebesar 9%, masih jauh dibawah dari target sebesar 30% dari luas wilayah. Fungsi utama RTH adalah membantu menyeimbangkan kondisi ekologis kota karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbon dioksida sekaligus menyimpan cadangan air. RTH yang rendah dalam hal kualitas dan kuantitas memberikan tekanan terhadap keseimbangan tata guna lahan di Provinsi DKI Jakarta akibat peningkatan luasan lahan terbangun.

2.1.3 *State*

Jumlah penduduk di DKI Jakarta pada tahun 2021 tercatat mencapai 10.609.681 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 9,98% dibandingkan tahun 2010. Sementara populasi penduduk bertumbuh, ketersediaan lahan dalam suatu wilayah cenderung stagnan, sehingga meningkatkan tingkat kepadatan penduduk. Untuk tetap tinggal di DKI Jakarta, beberapa warga memilih untuk tinggal di luar kawasan pemukiman, seperti bantaran sungai hingga kawasan lindung, sehingga terjadi

perubahan fungsi lahan. Area yang sejatinya dapat difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi semakin berkurang luasnya, bahkan RTH yang sudah ada semakin berkurang fungsinya.

2.1.4 Impact

Dampak dari alih tata guna lahan seperti terciptanya pemukiman kumuh dengan fasilitas air bersih dan listrik kurang memadai, serta rentan terhadap bencana kebakaran. Sepanjang tahun 2021 sebanyak 536 RT terdampak bencana kebakaran, dengan korban mengungsi mencapai 9.827 jiwa dan korban meninggal dunia sebanyak 24 orang. Sementara kerugian materiil tidak kurang dari Rp 177.183.000,00. Menurut Komnas HAM, sepanjang tahun 2016-2018 telah terdapat 211 laporan kasus terkait isu agraria, dengan salah satu daerah penyumbang konflik terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta. Konflik ini terus terjadi akibat adanya pembangunan yang sering kali tidak menghormati dan melindungi warga terdampak di dalamnya.

2.1.5 Responses

DKI Jakarta sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga tahun 2030, namun perlu ditambah aturan yang lebih detil melalui yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan *Low Impact Urban Development Guideline*. Sepanjang tahun 2022 telah dilakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi dengan melakukan penanaman pohon yang total mencapai 10.088 batang pohon di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peningkatan luas lahan RTH dan penyegaran RTH eksisting sehingga dapat menunjang kondisi lingkungan dan meningkatkan nilai IKTL.

2.2 Kualitas Air

2.2.1 Driving Forces

Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, aktivitas perdagangan dan perekonomian di DKI Jakarta cukup pesat. Tercatat sebanyak 1.792

perusahaan besar dan sedang (Makro) dan 58.537 perusahaan kecil (Mikro) tersebar di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, DKI Jakarta tidak hanya menerima penduduk, namun juga turut menyumbang migran tetap ke luar ibu kota. Jumlah penduduk yang tinggi akan memberikan permasalahan yang semakin heterogen. Diantaranya adalah pertumbuhan pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai dan permukiman tidak teratur lainnya.

2.2.2 Pressure

Jumlah penduduk yang tinggi membutuhkan lebih banyak ruang untuk pemenuhan tempat tinggal dan menjalani aktivitas ekonomi. Tercatat per tahun 2021, luas area tutupan lahan vegetasi adalah 146,04 Ha. Di sisi lain, buangan (polutan) terjadi secara tidak terkendali karena baik pelaku air limbah industri maupun air limbah domestik yang umumnya tidak melakukan pengurasan dalam 1-3 tahun secara berkala. Selain itu, kondisi hidrogeografis DKI Jakarta sebagai dataran rendah turut mempengaruhi kualitas air khususnya pada air tanah karena intrusi air laut.

2.2.3 State

Hasil uji kualitas air sungai di DKI Jakarta pada 120 titik menyatakan 70% diantaranya termasuk dalam status mutu cemar berat. Dari hasil nilai *feature importance* (FI), diketahui parameter *fecal coliform* memberikan pengaruh pencemaran yang signifikan. Pada hasil uji kualitas air danau (180 titik), 40,5% lokasi termasuk dalam status mutu cemar berat dengan nilai FI signifikan pada parameter *fecal coliform*. Pada hasil uji kualitas air laut (42 titik), 7,1% lokasi termasuk dalam status mutu cemar sedang dengan nilai FI signifikan pada parameter suhu dan amonia. Sedangkan pada uji kualitas air tanah (267 titik), 6,7% lokasi termasuk dalam status mutu cemar berat dengan nilai FI signifikan pada parameter *total coliform*.

2.2.4 Impact

Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak adalah 95,17%. Dalam mencapai air minum layak, 80% masyarakat menggunakan air minum kemasan. Dalam pencatatan jenis penyakit di DKI Jakarta pada tahun 2021, jumlah kasus penyakit diare

adalah 12.664 kasus (14,5%). Padahal diare merupakan salah satu *water borne disease*, yakni penyakit yang bersumber dan berkembang melalui air. Sehingga tingginya kasus penyakit diare di DKI Jakarta dapat mengindikasikan kualitas air di DKI Jakarta masih belum memenuhi kualitas yang aman untuk digunakan dalam kebutuhan pemenuhan air hygiene sanitasi.

2.2.5 Responses

Bentuk respon atau jawaban dari permasalahan terkait dengan penurunan kualitas air dilakukan melalui regulasi dan program yang direncanakan dalam target kurun waktu yang direncanakan. Usaha peningkatan kualitas air diantaranya termasuk pengelolaan permasalahan air limbah dalam program Jakarta *Sewerage and Sanitation* (JSS) dan revitalisasi tangki septik. Pemerintah juga melakukan usaha peningkatan infiltrasi air tanah melalui program zonasi air tanah dan peningkatan RTH melalui konsep taman pintar dan taman maju bersama. Disisi lain, pemerintah juga berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan air jaringan melalui pembangunan SPAM Jatiluhur I.

2.3 Kualitas Udara

2.3.1 Driving Forces

Pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan (3,56%) pada 2021 meningkatkan aktivitas masyarakat yang ditandai dengan dilonggarkannya kebijakan PPKM dimana terjadi peningkatan kegiatan konstruksi secara signifikan ditandai dari kenaikan penerbitan IMB sebesar 49%. Selain itu jumlah kendaraan bermotor meningkat hingga 7,60% pada 2021 yang didominasi kendaraan berbahan bakar bensin.

2.3.2 Pressure

Aktivitas di Provinsi DKI Jakarta banyak memanfaatkan bahan bakar dimana penggunaan bahan bakar paling tinggi dari Transportasi (44%), Industri Energi (31%) dan Manufaktur (10%). Sejalan dengan hal tersebut, Beban Emisi paling besar berasal dari Transportasi dengan dominasi emisi CO (287.317 ton), NO_x (76.793 ton), PM₁₀ (5.113 ton), PM_{2.5} (5.257 ton),

BC (5.048 ton) dan NMVOCs (198.936 ton). Selain itu terdapat potensi emisi GRK dari persampahan berupa CH₄ (341 ton/hari) dan CO₂ (953 ton/hari).

2.3.3 State

Pemantauan kualitas udara memberikan kesimpulan bahwa tidak hanya terjadi emisi dari CO, BC, NMVOCs, namun signifikansi pencemaran PM₁₀ dan PM_{2.5} yang melebihi baku mutu akibat peningkatan aktivitas transportasi (asap), konstruksi (debu) hingga pembangkitan listrik. Terkhusus wilayah Jakarta Utara mengalami signifikansi pencemaran SO₂ mengingat lokasi didominasi oleh aktivitas industri (manufaktur dan pembangkit listrik) hingga pergudangan yang menyebabkan tingginya arus lalu lintas. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 66,69 menjadi 66,52 pada 2021.

2.3.4 Impact

Penurunan kualitas udara erat kaitannya dengan terjadinya Hujan Asam yang memiliki memiliki rerata pH tahunan lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Penurunan pH sangat berkorelasi dengan tingginya parameter SO₄ dan NO₃ pada air hujan akibat kenaikan konsentrasi SO₂ dan NO_x di udara yang mencapai 16% dan 41%. Buruknya kualitas udara dapat menimbulkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang pada 2021 mencapai 192.067 penderita. Melalui *random forest classifier* diketahui bahwa PM₁₀ dan SO₂ memiliki signifikansi (*importance index*) tertinggi sehingga wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur yang memiliki konsentrasi PM₁₀ dan SO₂ tertinggi diklasifikasikan dalam status udara "Sangat Kurang".

2.3.5 Responses

Pelaksanaan Amanah dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 melalui pengembangan moda transportasi massal (cth. MRT, LRT dan BRT), pengetatan Izin Pemanfaatan Ruang (cth. Izin Lokasi, IMB dan IPPR), pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB),

implementasi *jakarta solar city*, optimalisasi *green building* hingga pengembangan hunian vertikal untuk menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.4 Risiko Bencana

2.4.1 Driving Forces

Jumlah penduduk di DKI Jakarta pada tahun 2021 tercatat sebanyak 11.261.595 jiwa, atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,58% dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan luas wilayah sekitar 662,33 km², maka DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk sebesar 15.978 jiwa/km². Penduduk dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dibutuhkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Namun dengan kompleksnya aktivitas manusia tanpa memperhatikan kondisi lingkungan akan mengakibatkan risiko bencana di kemudian hari.

2.4.2 Pressure

Pembangunan di DKI Jakarta menarik penduduk dari luar DKI Jakarta untuk datang (migran) untuk mendapatkan kesempatan kerja, dimana UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar Rp 4.416.816. Namun arus migrasi ke kota yang cukup besar pada umumnya dipandang negatif bagi kota yang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial, lingkungan, keindahan, dan ketertiban. Pelaku migrasi ke kota (utamanya kelompok pendatang dengan minim keahlian) menimbulkan berbagai masalah, antara lain berkembangnya kawasan permukiman kumuh, degradasi lingkungan, kerawanan sosial dan tindak kriminal, dan permasalahan pengangguran serta kemiskinan. Kompilasi berbagai isu tersebut ditambah dengan terbatasnya luas lahan di DKI Jakarta memberikan tekanan yang tinggi terhadap lingkungan.

2.4.3 State

Jumlah dan sebaran penduduk, masifnya pembangunan di DKI Jakarta, serta faktor alam mendorong beragam bencana yang melanda DKI Jakarta. Berlokasi di wilayah dengan iklim tropis, curah hujan di DKI Jakarta cenderung tinggi namun fasilitas drainase saat ini dengan daya tampung

maksimal 100 mm/hari menandakan DKI Jakarta sebagai rawan bencana banjir. Kondisi topografi Jakarta yang berbukit di wilayah selatan juga menjadikannya sebagai daerah rawan bencana tanah longsor. Terlebih jika terdapat bangunan di atasnya. Sedangkan bencana kebakaran sangat rawan terjadi di pemukiman kumuh dan padat penduduk. Kondisi instalasi listrik yang tidak memadai, bahan bangunan mudah terbakar, dan minim jalur evakuasi memperparah kemungkinan terjadinya kebakaran.

2.4.4 Impact

Sepanjang tahun 2021, kejadian banjir menggenangi 966 RT yang menyebabkan lima orang meninggal dunia dan 15.463 jiwa mengungsi. Kejadian kebakaran terjadi sebanyak 536 kejadian, yang menyebabkan 9.827 warga mengungsi, sedangkan korban jiwa berjumlah 24 orang. Sementara total kerugian mencapai Rp 177.183.200.000. Pada kejadian bencana pohon tumbang, tercatat korban jiwa sebanyak dua orang dengan kerugian mencapai Rp 123.000.000. Untuk bencana tanah longsor, sebanyak 12 kejadian bencana menimbulkan kerugian mencapai Rp 420.000.000. Sedangkan perkiraan kerugian dari bencana angin kencang sebesar Rp 75.000.000. COVID-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional non alam turut berdampak pada meningkatnya angka kematian di DKI Jakarta. Hingga 31 Desember 2021 konfirmasi jumlah pasien meninggal dunia karena COVID-19 mencapai 183.735 jiwa.

2.4.5 Responses

Terhadap isu bencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dinas terkait telah menerbitkan beberapa regulasi untuk penanggulangan bencana, seperti dokumen RPB 2017-2022, regulasi terkait pengelolaan sampah, program pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana (KB), pengendalian arus urbanisasi pasca hari raya, dan aturan pengenaan pajak terhadap penggunaan air tanah. Pada masa pandemi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta mempercepat vaksinasi dosis pertama dan kedua dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain itu juga diterapkan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan beberapa tingkatan untuk membatasi kegiatan interaksi.

2.5 Perkotaan

2.5.1 *Driving Forces*

Perkembangan perekonomian meningkatkan nilai ekspor dan impor DKI Jakarta hingga 19% dan 34% yang mendorong konsumsi masyarakat, ditandai dengan kenaikan rerata pengeluaran per kapita bulanan sebesar 3,47% serta penambahan hunian oleh Perum Perumnas sebanyak 332 rumah dan 51 *tower* rumah susun pada tahun 2021. Selain itu pengembangan Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi *Smart City* memiliki andil dalam berbagai pembangunan dan peningkatan aktivitas masyarakat.

2.5.2 *Pressure*

Pertumbuhan ekonomi dan pelanggaran PPKM menyebabkan peningkatan aktivitas perkotaan baik dari segi transportasi, perubahan pola berbelanja masyarakat (cth. *e-commerce*), hingga berbagai industri yang semakin giat dalam melakukan berbagai produksi serta berbagai pembangunan dapat menyebabkan peningkatan kuantitas sampah yang dihasilkan serta perubahan komposisi sampah dimana meskipun didominasi jenis organik, namun terjadi peningkatan sampah plastik dan kertas/karton.

2.5.3 *State*

Dari segi persampahan, peningkatan populasi penduduk menjadi 10,61 juta jiwa atau naik 0,58% dari tahun sebelumnya yang diikuti dengan peningkatan aktivitas masyarakat berimbas pada kenaikan timbulan sampah dari 8.370 ton/hari menjadi 8.448 ton/hari. Pengolahan Bank Sampah yang hanya 26,16 ton/hari belum dapat mengurangi sampah secara signifikan sehingga berpotensi terhadap menumpuknya sampah di TPA Bantargebang. Dari segi sosial, pertumbuhan penduduk dan kondisi pemulihan ekonomi juga berpotensi terhadap adanya permasalahan terkait kesenjangan ekonomi hingga ketidakteraturan pemukiman.

2.5.4 *Impact*

Kondisi pengolahan sampah yang belum optimal dan menurunnya kapasitas pengangkutan sampah dapat menyebabkan adanya penumpukan sampah serta permasalahan sanitasi dapat memunculkan vektor penyakit. Selain itu, kondisi perekonomian yang masih dalam masa pemulihan pandemi dimana terjadi banyaknya Pemutusan Hak Kerja (PHK) massal hingga terdampaknya pendapatan sektor informal karena PPKM menyebabkan adanya peningkatan jumlah Rumah Tangga (RT) miskin yang mencapai 5 (lima) kali lipat dibandingkan tahun 2020.

2.5.5 Responses

Terhadap permasalahan persampahan Provinsi DKI Jakarta tengah merencanakan pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) yang didalamnya terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), peningkatan kolaborasi pengelolaan sampah bersama masyarakat melalui *Jakarta Recycling Center* (JRC) dan Si Pepeng Paling Rukun hingga pelaksanaan *Landfill Mining*. Selain itu, perlu diberlakukannya pemberdayaan masyarakat dan bantuan ekonomi.

2.6 Tata Kelola

2.6.1 Driving Forces

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota negara sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional, politik, dan kebudayaan yang memberikan kontribusi yang tinggi pada nilai Produk Domestik Bruto (PDRB). DKI Jakarta memiliki nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per tahun 2021 sebesar Rp 2.914.581,08 (Miliar) yang didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,85%), Industri Pengolahan (12,28%).

2.6.2 Pressure

Melalui komisi penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta, Dinas lingkungan hidup melakukan penilaian terhadap analisis mengenai dampak lingkungan. Sepanjang tahun 2021 terdapat total 474 (63%) pemrakarsa kegiatan yang dinyatakan tidak taat. Selain dari instansi Dinas Lingkungan Hidup,

masyarakat juga berperan dalam melakukan pengawasan dalam memberikan tekanan kepada pihak terkait yang berpotensi dan/atau merusak lingkungan. Pada tahun 2021, terdapat 11 topik pengaduan yang dilaporkan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

2.6.3 State

Pembangunan yang semakin meningkat dikhawatirkan akan menimbulkan risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sepanjang tahun 2021, terdapat total 3013 dokumen izin lingkungan yang diterbitkan dan 343 pemrakarsa yang mendapat izin mengelola limbah B3. Pencatatan dan pengawasan yang baik di DKI Jakarta didukung oleh personil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI dengan latar belakang pendidikan dari tingkat SLTA sampai level Master (S2). Selain itu, untuk meningkatkan mutu kerja, sejumlah staf fungsional bidang lingkungan juga dibekali dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai.

2.6.4 Impact

Tata kelola yang tidak baik dapat menurunkan kualitas lingkungan. Berdasarkan hasil pembobotan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Provinsi DKI Jakarta mendapatkan skor akhir 54,43 dengan klasifikasi IKLH 'sedang'. Dengan nilai tersebut, IKLH pada DKI Jakarta telah meningkat 4,57% di bandingkan sebelumnya. Tata kelola lingkungan yang baik dapat melindungi kualitas lingkungan karena dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem dan biodiversitas flora dan fauna di DKI Jakarta.

2.6.5 Responses

Pemerintah mengeluarkan total 50 produk hukum pada tahun 2021 terkait pengelolaan lingkungan. Selain itu, untuk menanggapi pengaduan permasalahan lingkungan, pemerintah memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat melalui program pemerintah DKI Jakarta program *Citizen Relations Managementi* (CRM). Pemerintah juga menyiapkan penganggaran pada tahun 2021 untuk membantu pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp 7.692.466.840.148. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta juga memberikan penghargaan kepada orang/kelompok/organisasi yang telah melakukan upaya peningkatan pengelolaan lingkungan.

3. Analisis Lingkungan Hidup Daerah

Hasil analisis isu lingkungan hidup melalui metode DPSIR kemudian dikaji untuk dilakukan penjarangan isu strategis lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Penetapan isu prioritas dilakukan dengan metode FGD secara daring. Kegiatan partisipatif dilakukan melalui jajak pendapat secara online yang dihadiri total 62 responden dari berlatar belakang instansi pemerintahan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta media dan praktisi individual. Penilaian pembobotan dilakukan dengan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) dan pemeringkatan isu prioritas dilakukan metode Proses Hirarki Analisis (*Analytical Hierarchy Process*) sehingga didapatkan pemeringkatan isu prioritas sesuai dengan besaran bobotnya.

3.1 Pencemaran Udara

Sektor transportasi menjadi penyumbang emisi CO, NO_x, PM₁₀, PM_{2.5}, BC dan NMVOCs tertinggi, sedangkan sektor Industri manufaktur menyumbangkan emisi SO₂ tertinggi. Selain itu, geliat aktivitas transportasi berpotensi menghasilkan emisi GRK hingga 11,86 juta TonCO₂eq atau 22%-nya dari total emisi GRK. Pengelolaan sampah yang belum optimal dapat menyumbang emisi GRK yang diperkirakan sebesar 819,72 tonCO₂/hari dan 292,76 tonCH₄/hari dari *open dumping*; 376,45 tonCO₂/hari dari adanya *open burning*; hingga 138,10 tonCO₂/hari dari insinerasi (rencana).

3.2 Bencana Banjir

Kejadian banjir di DKI Jakarta pada tahun 2021 tidak lebih parah jika dibandingkan pada tahun 2020, namun ancaman banjir tetap ada dan harus diwaspadai, karena dilihat dari berbagai aspek alami, seperti topografi, geologi, dan geomorfologinya, Jakarta merupakan wilayah rawan banjir. Dengan tingginya aktivitas manusia yang terjadi di permukaan tanah, memperburuk kondisi fisik wilayah Jakarta. Hilangnya air tanah dan

beban konstruksi di permukaan tanah secara berangsur-angsur akan membuat permukaan tanah mengalami penurunan.

Wilayah Jakarta bagian utara tercatat memiliki tingkat penurunan muka tanah cukup tinggi, ditambah elevasi terendah sebesar -13 mdpl. Maka dengan kombinasi tersebut, jika air laut sedang pasang, banjir rob tidak dapat dielakan. Pada tahun 2050 ketinggian muka air pasang laut diproyeksikan sebesar 149,72 cm. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 149,72 cm akan terkena banjir rob (19.463,26 Ha).

3.3 Kerawanan Air Bersih

Cakupan layanan PAM Jaya baru melayani 65% wilayah DKI Jakarta. Kerawanan pada ketersediaan air bersih memiliki hubungan yang kuat terhadap akses sanitasi dan air minum yang layak. Diketahui, akses air minum layak pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2020) di semua Kab/Kota Administrasi DKI Jakarta. Pada hasil uji kualitas air, didapatkan pada sumber air sungai dan danau/situ, sebagian besar berada dalam kategori tercemar berat. Sedangkan pada sumber air baku sumur/tanah dan air laut berada dalam kategori cemar ringan.

Kualitas sumber air permukaan di DKI Jakarta yang buruk diakibatkan oleh kegiatan antropogenik seiring dengan tingginya jumlah penduduk. Sebanyak 75% (1.038.205 m³/hari) air limbah di Jakarta berasal dari kegiatan domestik. Namun, baru 14% wilayah Jakarta yang telah memiliki prosedur pengelolaan limbah cair yang telah memenuhi standar.

3.4 Penurunan Tanah dan Kerusakan Air Tanah

Penurunan tanah paling parah mengarah pada wilayah utara Provinsi DKI Jakarta. Dalam data Bank Dunia, DKI Jakarta termasuk salah satu kota dengan tingkat penurunan muka tanah paling cepat di dunia, yakni sebesar 1-5 cm/tahun. Penurunan tanah yang cepat juga turut mempengaruhi kerusakan air tanah. Dalam hasil uji kualitas (267 sampel) didapatkan meskipun umumnya air tanah tidak keruh, namun 9.7% diantaranya masih berwarna, 18% sampel melebihi standar baku mutu kualitas mangan, 25.1% sampel tercemar *fecal* dan 61.4% tercemar *total coliform*.

3.5 Pengelolaan Sampah Belum Optimal

Timbulan sampah sebesar 8.448 ton/hari belum dikelola secara optimal. Persentase pengangkutan hanya 86% menyebabkan sebanyak 14% sampah tidak terangkut, dikelola dengan cara yang kurang baik seperti *open burning* yang mencapai 464 ton/hari. Selain itu diperkirakan hanya 592 ton/hari (dari Bank Sampah, TPS 3R dan JRC) yang dapat terolah, sedangkan sisanya (6.706 ton/hari) dibawa ke TPA Bantargebang. Meskipun terdapat *composting* (1,6 ton/hari) dan aktivitas pemulung (972 ton/hari) yang dapat mereduksi sampah, namun diperkirakan masih terdapat 5.733 ton/hari yang harus ditimbun.

Dengan sisa luas 7,97 Ha dari 111,97 Ha, maka lahan TPA Bantargebang diperkirakan hanya dapat menampung sampah sebanyak 4,78 juta Ton atau memiliki masa pakai 1,8 – 2,3 tahun saja jika tidak ada peningkatan kapasitas pengolahan dari sumber.

4. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbagai inovasi telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjawab permasalahan isu lingkungan hidup. Pada pembahasan tahun 2021 ini, disampaikan 12 inovasi yang terbagi ke dalam lima kategori sebagai berikut:

- A. Inovasi dalam Pengelolaan Sampah
 - 1. Jakarta Recycling Center (JRC)
 - 2. Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)
- B. Inovasi dalam Pengelolaan Kualitas Udara
 - 1. Bus Listrik TransJakarta
 - 2. Uji Emisi
 - 3. Jakarta International Stadium sebagai *Green Building*
- C. Inovasi dalam Mitigasi Bencana Banjir
 - 1. Pembangunan dan Intensifikasi RTH
 - 2. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Limpasan
- D. Inovasi dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Penyediaan Air Bersih

1. Revitalisasi IPAL Setempat
 2. Inovasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile dan Teknologi SWRO
- E. Inovasi dalam Konservasi Air Tanah
1. Zonasi Bebas Air Tanah
 2. Sumur Resapan/Drainase Vertikal

Inovasi-inovasi yang telah dikeluarkan diharapkan dapat meningkatkan usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masyarakat dan multipihak untuk mencapai pemerintahan yang berkelanjutan (*Continuous Improvement*) dan berkesinambungan.